
PEMBINAAN PELAKU USAHA PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG

Aghnia Amalia Qori

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 8, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Human Resource Management

Group Development

Tourism Business Actors

Sustainable Tourism

ABSTRACT

This research aims to identify how the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports of Sumedang Regency conducts the development of tourism business actors. The research method used in this study is a qualitative method. Informants were selected using purposive sampling, consisting of the Head of the Tourism Division, the Expert Junior Staff of Tourism and Creative Economy, Staff of the same division, as well as the managers of Kampung Karuhun and Puteri River Inn tourist destinations. Data collection techniques involved literature studies and field studies through observation, interviews, documentation, and triangulation. Data validity was ensured through credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The data analysis techniques used include data collection, data reduction, data display, and verification. The results indicate that the development of tourism business actors by the department has not been optimal. It remains incidental, is not conducted regularly, and does not cover all tourism sectors. Additionally, no updated and continuous development guidelines are available.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Aghnia Amalia Qori

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: aghniaamaliaq@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pariwisata merupakan sektor utama yang memegang peranan penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan kontribusi besar yang diberikan oleh industri pariwisata terhadap pendapatan nasional suatu negara, yang berasal dari aktivitas pengunjung di berbagai objek wisata. Selain itu, kawasan yang ditetapkan untuk pariwisata memiliki potensi untuk merangsang dan meningkatkan inisiatif pembangunan di suatu negara, menciptakan kesempatan kerja, menciptakan peluang bisnis baru, dan memajukan ekonomi lokal, yang sangat memengaruhi kemajuan ekonomi masyarakat di negara tersebut secara keseluruhan. Menurut Wahab dalam (Takome, Suwu, & Zakarias, 2021) Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan standar hidup serta menstimulasi sektorsektor produktivitas lainnya.

Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian yang cukup besar. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki banyak potensi wilayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar biasa, dengan lebih dari 17.540 pulau yang melahirkan berbagai suku bangsa, masing-masing dengan latar belakang budaya yang unik. Kekayaan alam yang melimpah ini menjadi aset utama untuk memajukan pariwisata, karena sektor pariwisata menonjol sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Menurut (Takome, Suwu, & Zakarias, 2021) sektor pariwisata dapat diyakini sebagai sektor andalan yang mampu memberi kontribusi bagi peningkatan devisa negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu sektor pariwisata masih dianggap layak dan penting untuk dikembangkan.

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 menjelaskan tujuan dari kepariwisataan, sebagai berikut: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk menarik minat wisatawan ke berbagai objek wisata di Indonesia, pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan dengan baik. Salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya pariwisata adalah Jawa Barat, yang diharapkan dapat menjadi tujuan wisata dunia. Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi alam, budaya dan wisata yang beragam, sehingga mendorong provinsi pariwisata untuk mewujudkan pengembangan potensi wisata alam dan budaya, serta mencapai pembangunan dan pengembangan pariwisata khas Jawa Barat sebagai identitas pariwisata daerah provinsi tersebut. Hal ini juga terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang.

Dari segi pariwisata, Kabupaten Sumedang mempunyai banyak sekali tempat wisata, mulai dari tempat wisata alam, tempat wisata buatan hingga tempat wisata budaya. Keberadaan pariwisata dalam bentuk apapun tentunya harus terus dikembangkan. Sesuai kebijakan pariwisata Kabupaten Sumedang yang dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2021-2025, pengembangan pariwisata bertujuan untuk menyediakan daya tarik wisata yang memadai berdasarkan potensi sumber daya lokal dan didukung oleh pelaku pariwisata yang handal, serta pengembangan industri pariwisata telah berjalan dengan baik. implikasi penting dalam satu atau lebih aspek.

Peraturan Daerah Sumedang No 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan Pasal 74 Ayat 1, Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

Beberapa tahun belakangan jumlah wisatawan di Kabupaten Sumedang menunjukkan kenaikan angka jumlah pengunjung.

Tabel 1. Data Wisatawan di Sumedang Periode 2021-2023

| Tahun | Jumlah Pengunjung (orang) |
|-------|---------------------------|
| 2021 | 671.674 |
| 2022 | 1.358.099 |
| 2023 | 1.894.416 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Peningkatan jumlah pengunjung di Kabupaten Sumedang dapat mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha pariwisata baik itu di bidang akomodasi, makanan dan minuman dan layanan wisata lainnya. Namun untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan, pembinaan kepada pelaku usaha menjadi penting. Pembinaan ini dapat mencakup pelatihan keterampilan pengelolaan usaha, dan peningkatan fasilitas sehingga pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berkembang, sekaligus mendukung daya tarik wisata daerah.

Pelaku usaha pariwisata merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Menurut (Yuliana, 2019) pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Pelaku usaha pariwisata mempunyai peran dan kontribusi dalam mengembangkan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 3, pelaku usaha pariwisata dikategorikan menjadi 13 bidang usaha yaitu,

Tabel 2. Jenis Pelaku Usaha Pariwisata

| No | Jenis Pelaku Usaha Pariwisata |
|-----|--|
| 1. | Daya Tarik Wisata |
| 2. | Kawasan Pariwisata |
| 3. | Jasa Transportasi Wisata |
| 4. | Jasa Perjalanan Wisata |
| 5. | Jasa Makanan dan Minuman |
| 6. | Penyedia Akomodasi |
| 7. | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi |
| 8. | Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran |
| 9. | Jasa Informasi Pariwisata |
| 10. | Jasa Konsultasi Pariwisata |
| 11. | Jasa Pramuwisata |
| 12. | Wisata Tirta |
| 13. | SPA |

Berdasarkan data di atas maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang perlu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata. Dengan adanya pembinaan dapat meningkatkan kepedulian pelaku usaha pariwisata dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan. Menurut (Anggara, 2016) mengemukakan bahwa pembinaan adalah upaya mendidik dan melatih agar berkembang lebih baik. Pembinaan juga berarti memberikan peluang dan kesempatan kepada pegawai untuk memahami tugas dan kewajiban sebagai pegawai. Pembinaan dilakukan agar program yang sedang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Dari 13 kategori pelaku usaha pariwisata hanya ada 4 yang menjadi binaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, dikarenakan Kabupaten Sumedang memiliki wewenang atas wilayahnya apa yang boleh dibangun dan tidak, sehingga Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang mengelompokkan dari 13 kategori menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 3. Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2023

| No. | Jenis Usaha | Jumlah Pelaku Usaha |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Objek Wisata | 77 |
| 2. | Jasa Makanan dan Minuman | 731 |
| 3. | Penyedia Akomodasi | 43 |
| 4. | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi | 81 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data yang di atas pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang, pada tahun 2023 sektor jasa makanan dan minuman menjadi sektor yang mendominasi lanskap usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang, yakni sebanyak 731 usaha. Sementara itu, sektor penyedia akomodasi merupakan sektor yang paling sedikit jumlahnya, yakni hanya 43 usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembinaan yang lebih terarah, seperti pelatihan inovasi produk dan jasa bagi sektor makanan dan minuman guna meningkatkan daya saing, serta dukungan permodalan dan pelatihan pengelolaan bisnis untuk mendorong pertumbuhan sektor akomodasi. Untuk sektor objek wisata yang berjumlah 77 usaha dan sektor hiburan yang berjumlah 81 usaha, pembinaan dapat difokuskan pada pengembangan destinasi, pengelolaan acara, dan strategi promosi digital. Strategi ini diharapkan dapat membangun ekosistem pariwisata yang lebih seimbang dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Sumedang sebagai destinasi wisata.

Pembinaan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang yaitu seperti bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* (FGS), seminar, lokakarya, *study banding*, pendampingan, dan lain sebagainya. Dan pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang terhadap pelaku usaha pariwisata berupa bimbingan teknis, *focus group discussion* (FGD), seminar yang mendatangkan ahli,

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada kurangnya pembinaan pelaku usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengatur strategi pembinaan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih kurang efektif. Dilihat dari penyusunan pedoman pembinaan yang tidak berkelanjutan dan metode pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang yaitu secara offline dan online.
2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih kurang dalam merencanakan pembinaan. Dilihat dari belum terlaksananya kembali penetapan tujuan pembinaan, penetapan sasaran pembinaan serta penetapan sasaran capaian/target.
3. Masih kurang optimalnya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam mengorganisasi dan melaksanakan pembinaan. Dilihat dari tidak konsistennya terhadap jadwal pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata yang idealnya dilakukan tiga bulan sekali tetapi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih kurang dari jadwal ideal.
4. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih kurang dalam mengukur dan mengevaluasi pembinaan, dilihat dari evaluasi pembinaan dan tindak perbaikannya. Masih banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan data statistik kunjungan usahanya.

Selain permasalahan pada indikasi-indikasi di atas, didukung pula dari hasil penelitian terdahulu oleh (Rido, 2021) menyatakan bahwa “Hambatan yang ditemui berupa kecilnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan kepemudaan terutama pada bidang kewirausahaan dan data kepemudaan yang ada masih sangat minim jumlahnya”.

Adapun hasil penelitian oleh (Ramdani, 2021) menyatakan bahwa “Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pengelola, rendahnya sikap kesungguhan dan keseriusan pengelola, tidak adanya kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diisi, kekurangsiapan anggota untuk ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan, sumber anggaran serta sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar unit usaha, rendahnya kebersamaan dari para anggota setiap unit usaha, keberanian anggota untuk dapat mengeluarkan pendapat masih kurang serta profesionalisme pengurus yang masih rendah, waktu yang dimiliki masih terbatas karena kesibukan melaksanakan pekerjaan masing-masing, juga fasilitas pendukung yang dimiliki masih belum memadai”

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau yang sering disebut *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017)

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2017) purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Subjek Penelitian

| No | Unsur | Jumlah (Orang) |
|---------------|---|----------------|
| 1. | Kepala Bidang Pariwisata | 1 |
| 2. | Kasi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | 1 |
| 3. | Staf Kasi Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | 1 |
| 4. | Pelaku Usaha | 2 |
| Jumlah | | 5 |

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan menurut (Sugiyono, 2017) sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut:
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara
 - 3) Dokumentasi
 - 4) Triangulasi

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan mengacu kepada teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Collection*/Pengumpulan Data
- b. Reduksi (*Data Reduction*)
- c. Penyajian Data (*Data Display*)
- d. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penelitian ini berkenaan dengan hal yang menyangkut sumber daya manusia khususnya dari aspek pembinaan. Oleh karena itu teori-teori utama yang akan dijadikan landasan adalah teori sumber daya manusia dan pembinaan. Menurut (Mathis & Jackson, 2017) mengatakan terdapat beberapa dimensi dalam mengukur pembinaan, yaitu:

- a. Mengatur Strategi
- b. Merencanakan
- c. Mengorganisasi dan Melaksanakan
- d. Mengukur dan Mengevaluasi

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut (Hermiken, 2022) “Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu”.

Pembinaan memegang peranan yang sangat penting sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku usaha pariwisata dalam menghadapi dinamika industri wisata. Pembinaan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia, membentuk perilaku yang positif, serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan. Menurut (Karmelia & Riauan, 2022) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa sesuatu telah mengalami kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan. Ada dua komponen dalam definisi ini yaitu pembinaan itu sendiri dapat berupa tindakan, proses, atau pernyataan suatu tujuan, dan pembinaan kedua dapat menunjukkan bahwa sesuatu dapat diperbaiki”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan pembinaan pelaku usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 5. Kesimpulan Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

| No | Dimensi | Indikator | Kesimpulan |
|----|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | Mengatur Strategi | Penyusunan Pedoman Pembinaan | Penyusunan pedoman dilakukan bertahap dengan pemantauan berkelanjutan, namun keterlibatan pelaku usaha masih minim. Diperlukan keterlibatan lebih aktif agar pedoman lebih relevan dan sesuai kebutuhan lapangan. |
| | | Penentuan Metode Pembinaan | Pembinaan pelaku usaha dilakukan melalui berbagai metode, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan praktek langsung dan kunjungan rutin dari dinas ke lapangan untuk memahami kondisi nyata dan meningkatkan hasil pembinaan. |
| | Merencanakan | Penetapan Tujuan Pembinaan | Tujuan pembinaan ditetapkan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelaku usaha melalui analisis, konsultasi, dan hasil monitoring serta evaluasi (monev), yang menjadi utamanya adalah peningkatan kapasitas SDM, standarisasi usaha, serta legalitas usaha pariwisata. |
| | | Penetapan Sasaran Pembinaan | Sasaran pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, dilengkapi dengan administrasi dan perlindungan hukum. Namun sasaran saat ini belum sepenuhnya merata. |
| | | Penetapan Sasaran Capaian/Target | Target pembinaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan tujuan yang spesifik dan realistis, serta dievaluasi untuk perbaikan. Namun, banyak target yang tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dan kurangnya monitoring langsung. Indikator capaian meliputi peningkatan jumlah NIB, sertifikasi usaha, dan kepuasan wisatawan. |
| | Mengorganisasi dan Melaksanakan | Penentuan Jadwal Pembinaan | Jadwal pembinaan disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang jelas, dengan durasi yang disesuaikan dengan materi. Fleksibilitas waktu diperlukan untuk pembinaan dan evaluasi berkala, namun saat ini pembinaan masih jarang dilakukan. Idealnya, pembinaan diadakan setiap dua atau tiga bulan sekali untuk hasil yang lebih optimal. |
| | | Pemberian Pengarahan | Pengarahan pembinaan diberikan secara langsung melalui pertemuan atau kunjungan lapangan serta secara tidak langsung melalui diskusi grup. Materi pengarahan |

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| | | | mencakup regulasi, strategi pemasaran, tata kelola, dan keselamatan, dengan pembagian berdasarkan tingkat usaha dari pemula hingga lanjutan. |
| | | Pemberian Insentif (Reward) dan Sanksi (Punishment) | Saat ini, insentif yang diberikan hanya berupa penghargaan, sertifikat, serta kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha, tidak insentif materi karena keterbatasan anggaran. Sanksi yang diterapkan masih sebatas teguran dan pengingat, sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | | Penyedia Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata yang tersedia meliputi WiFi, sistem informasi, serta fasilitas seperti proyektor dan ruang rapat. Namun, keterbatasan masih ada, terutama dalam kendaraan dinas, sehingga sering menggunakan fasilitas pribadi. Dinas juga membantu dalam perizinan dan arahan usaha, meskipun masih banyak sarana yang diperlukan. |
| | Mengukur dan Mengevaluasi | Evaluasi Pembinaan | Evaluasi pembinaan dilakukan melalui komunikasi, monitoring, survei, dan feedback dari pelaku usaha untuk menganalisis hasil dan menyusun rekomendasi. Evaluasi rutin dilakukan, namun tanpa monitoring langsung ke lapangan evaluasi menjadi kurang efektif. |
| | | Tindak Perbaikan | Tindak perbaikan dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan, merencanakan perbaikan, dan berkomunikasi dengan stakeholder. Diperlukan monitoring ke lapangan dan komunikasi intensif untuk memastikan efektivitas pembinaan. |

Sumber: Hasil wawancara dilakukan kepada informan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, Wisata Kampung Karuhun, Wisata Puteri River Inn 2025

Berdasarkan tabel di atas dalam mengatur strategi pada pembinaan pelaku usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dikatakan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari beberapa aspek diantaranya indikator penyusunan pedoman pembinaan sudah ada dokumentasi yaitu SOP pembinaan tahun 2014, namun sampai saat ini belum ada keterbaruan dalam penyusunan pedoman pembinaan sehingga kurang relevan dengan saat ini karena tidak mengikuti perkembangan. Selain itu, untuk indikator penentuan metode pembinaan telah dilakukan dengan berbagai metode pembinaan yaitu bimbingan teknis, event dan sosialisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kunjungan ke lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Regiyati & Rusli, 2021) "Strategi merupakan rangkaian keputusan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan agar efektif dan efisien."

Selanjutnya untuk dimensi merencanakan pada pembinaan pelaku usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dikatakan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari aspek yang sudah terpenuhi yaitu penetapan tujuan pembinaan. Dan beberapa aspek yang cukup terpenuhi diantaranya dalam indikator penetapan sasaran, belum meratanya sasaran pembinaan dan indikator penetapan sasaran capaian/target dalam Laporan Pelaksanaan Program Bidang Pariwisata Tahun 2023 yang menjadi peserta pembinaan hanya 35 dari target 60 pelaku usaha. Hal ini merujuk pada pendapat Ismaya Bambang dalam (Mayasari, et al., 2022) bahwa "Perencanaan adalah suatu aktivitas dalam rangka menentukan tujuan yang hendak di raih dan tahapan dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan dari awal". Adapun menurut Permana Jobar dalam (Mayasari, et al., 2022) menekankan secara konseptual di definisikan sebagai sebuah rencana tindakan untuk capaian strategis yang hendak diraih, tidak berlebihan jika perencanaan di jadikan sebagai acuan atau pedoman.

Kemudian dimensi mengorganisasi dan melaksanakan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Terdapat aspek yang sudah terpenuhi yaitu indikator pemberian pengarahan. Dan adapun aspek yang cukup terpenuhi yaitu indikator penentuan jadwal pembinaan dilihat dalam LKIP Disparbudpora tahun 2023 pembinaan yang dilakukan hanya 2 kali dalam satu tahun menunjukkan belum optimal dari jadwal ideal yang seharusnya dilakukan 2-3 bulan sekali, untuk indikator pemberian insentif (reward) dan sanksi (punishment) belum ada pemberian insentif berupa materi karena kendala anggaran, dan indikator penyedia sarana dan prasarana dilihat dari Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Disparbudpora Tahun 2025 hanya berupa kendaraan roda empat 1 unit dan kendaraan roda dua 1 unit, sehingga mengharuskan memakai kendaraan pribadi untuk kunjungan ke lapangan. Hal ini selaras dengan pendapat Suhendi dan Sasangka dalam (Pastika, Santanu, & Maherni, 2016) pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan

sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan. Dan pendapat dari (Wiestra, dkk, 2014) “Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Lalu dimensi mengukur dan mengevaluasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Dalam aspek evaluasi masih kurang monitoring langsung ke lapangan yang membuat proses evaluasi menjadi kurang efektif. Dalam aspek tindak perbaikan yang dilakukan cukup baik, namun tingkat keberhasilannya belum optimal karena kunjungan langsung ke lapangan masih kurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Lihat Syaiful Bahri Djamarah dalam (Idrus L, 2019) “Pengertian pengukuran terarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kuantitas sesuatu, karena itu biasanya diperlukan alat bantu. Sedangkan penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu”.

4. CONCLUSION

Sektor pariwisata sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata dapat menjaga keberlangsungan, kualitas layanan, dan daya saing usaha di industri pariwisata.

Pembinaan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, seperti dalam hal manajemen usaha, pelayanan prima, serta pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan antar destinasi wisata semakin ketat dan tuntutan wisatawan terhadap kualitas pelayanan juga semakin tinggi. Selain itu, pembinaan juga mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal, yang menjadi nilai tambah dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berdaya saing tinggi.

Pembinaan pelaku usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang telah mencakup kegiatan seperti bimbingan teknis, sosialisasi, focus grup discussion (FGD), dan pelatihan. Melalui bimbingan teknis dan pelatihan, pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai standar pelayanan wisata, pengelolaan usaha, dan strategi promosi yang efektif. Sementara itu, FGD menjadi sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya tukar pikiran antara pelaku usaha dan pihak pemerintah, guna menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan kebijakan yang diterapkan.

Namun, pelaksanaan pembinaan belum berjalan dengan optimal karena masih bersifat insidental, tidak dilakukan secara berkala, dan belum mencakup seluruh pelaku usaha. Selain itu, pembinaan belum terdapat pedoman yang diperbaharui secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih terstruktur dan strategi pembinaan yang komprehensif agar pembinaan dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang.

REFERENCES

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Hermiken, S. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*(Vol. 4 No.2 (2022): JAN MAHA 4.2), 1-10. doi:<https://doi.org/10.51279/janmaha.v4i3.550>
- Idrus L. (2019). Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*(Volume. 9, No. 2 Agustus 2019), 920-935.
- Karmelia, S., & Riauan, M. A. (2022). Komunikasi Interpersonal Dalam Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Kelas 2A Dewasa Kota Pekanbaru. *Journal of Management Communication and Organization*(Vol. 1 No. 01 (2022): Journal of Management Communication and Organization), 42-53. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JMCO/article/view/42>
- Mathis, & Jackson. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 9*. (J. Sadeli, & B. P. Hie, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.
- Mayasari, N., Arifin, M. M., Purnomo, D., Dumiyati, Suyitno, M., Hikmah, N., . . . Sari, F. (2022). *Perencanaan Pendidikan*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Pastika, I. L., Santanu, G., & Maherni, K. E. (2016). Penerapan Konsep Pengorganisasian Dan Pengarahan Pada PT. Bayus Cargo Badung, Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*(Vol 12 No 3 November (2016): Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan), 197-205.

-
- Ramdani, R. (2021). Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Unigal Repository, Volume 01 Nomor 01*, 360-372. Retrieved from <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/901>
- Regiyati, S., & Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru (Strategy of the Investment Service and the One Stop Service in Increasing Investment at Pekanbaru City). *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasipol)*(Vol 2, No 1, 2021), 47-56. doi:<https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i1.315>
- Rido, M. (2021). Pembinaan Kepemudaan Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Repository Universitas Islam Riau*. Retrieved from <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9136>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Takome, S., Suwu, E. A., & Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmial Society*(Vol. 1 No. 1 (2021)), 1-15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/36326/33820>
- Yuliana, R. (2019). *Upaya Pelaku Wisata (Studi Deskriptif Tentang Upaya PT Pelabuhan Indonesia Dalam Memperkenalkan Kampung Lawas Maspati Surabaya Sebagai Salah Satu Objek Wisata Di Surabaya)*. Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94235>